

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdoellah, Awan, 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung
- Ali, Achmad, 2011. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Bisri, Ilhami, 2007. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Buku Saku Hak Atas Kesehatan, 2019. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
- Kementerian Kesehatan, 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke-5*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Kementerian Kesehatan, 2021. *Buku Saku Tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-19*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Kementerian Kesehatan, 2021. *Buku Saku Pelacakan Kontak (Contact Tracing) Kasus Covid-19*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Kementerian Kesehatan, 2021. *Pedoman Komunikasi Risiko untuk penanggulangan Krisis Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI Sekretariat Jenderal
- Lutfi Effendi, 2003. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia Publising
- Marpi, Yapiter, 2020, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya : PT. Zona Media Mandiri
- Murtir Jeddawi, 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Total Media

- Nazir, Moh, 2005. *Metode Penelitian*. Bogor Selatan: Penerbit Ganesha Indonesia
- Sarman, Mohammad Taufik Makarao, 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Smith, Rhona KM, *et al*, Knut D. Asplund dkk Ed, 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII
- Soerjowinoto, Petrus, 2017. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar: Buku Panduan Mahasiswa*. Semarang : Unika Soegijapranata
- Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali
- Suhardono, Edy, 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Swaesti, Eista, 2020. *Covid-19: Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona Virus*, Yogyakarta: Javalitera
- Widanti, Agnes, 2015. *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Unika Soegijapranata*, Semarang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan
- Viswandro, 2014. *Kamus Istilah Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia
- Yuhelson, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing

Jurnal:

- Albert Pierce (1956). *On The Concepts Of Role And Status*: Neue olge/New Series, Vol.6. no.1, 29-34, diakses dari:
<https://www.jstor.org/stable/43643850>

- Arry Bainus & Junita Budi Rachman, *Pandemi Penyakit Menular (Covid-19) Hubungan Internasional*. IntermeSic: Journal of International Studies, Volume 4, No.2, Mei 2020 (111-123)
<https://intermestic.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/view/194>
- Gandryani, Farina, Fikri Hadi, *Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia : Hak atau Kewajiban Warga Negara*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 10 Nomor 1, April 2021, diakses dari: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/622>. 30 September 2022
- Leonardo W. Heyerdahi, *et al. Conditionality of Covid-19 vaccine acceptance in European countries*. Elsevier: Vaccine 40 (2022) 1191-1197, diakses dari: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35125225/>
- Mudfar Alianur, Nurlaila, Alena, *Implementation Of Health Services In Class IIB Takengon Prison*, Jurnal Dusturiyah, Vol.12, No.1 (januari-Juni) 2022, Hlm. 36. Diakses dari: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/12281>
- Mulyani, Sri dkk, *Pemberitaan Vaksin Nusantara Terhadap Kepercayaan Generasi Milineal Pada Kinerja Kabinet Jokowi Jilid II*, Jurnal Pekommas Special Issue 2021: The Role of Communication and IT against Covid-19: 79-89, diakses dari: <https://www.neliti.com/publications/520912/the-effect-of-news-about-vaksin-nusantara-on-millennials-trust-in-the-performanc>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Vaksinasi Segera Dimulai, Presiden : 329,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Telah Dipesan*, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses dari: <https://setkab.go.id/vaksinasi-segera-dimulai-presiden-3295-juta-dosis-vaksin-covid-19-telah-dipesan/>.
- Suraya, I., Nurmansyah M. I., Rachmawati, E., Al Aufa, B., & Koire, I. I. (2020). *The Impact of Large-scale Social Restriction on COVID-19 Incidence: A Case Study of Four Regions in Indonesia*. Kesmas: National Public Health Journal, 15(2), 49–53, diakses dari: [The Impact of Large-scale Social Restriction on COVID-19 Incidence: A Case Study of Four Regions in Indonesia | Semantic Scholar](#)

Syaron Brigitte Lantaeda, Florence, Joorie, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik, volume 04 No.048, hlm.2, diakses dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/17575/17105>

Widodo, Hartono dkk, *Kebijakan Wajib Vaksinasi Covid-19 ditinjau dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum, dan Hak Asasi Manusia*, Indonesia Law Reform Journal, Volume 1 No. 3, Nov 2021, diakses dari: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/18244>. 30 September 2022

Tresiana, Novita dkk, *Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Ilmu Administrasi, volume 19, No. 1, Juni 2022, diakses dari: <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/863>.

Peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen
[UUD No. - tentang UUD 1945 dan Amandemen \[JDIH BPK RI\]](#)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
[UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular \[JDIH BPK RI\]](#)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
[UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia \[JDIH BPK RI\]](#)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social, And Cultural Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya)
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40256/uu-no-11-tahun-2005>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
[UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan \[JDIH BPK RI\]](#)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

[UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah \[JDIH BPK RI\]](#)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/90037/uu-no-6-tahun-2018>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137323/uu-no-2-tahun-2020>

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/58188/pp-no-40-tahun-1991>

Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161210/perpres-no-14-tahun-2021>

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135058/keppres-no-11-tahun-2020>

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135718/keppres-no-12-tahun-2020>

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota

[Permenkes No. 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota \[JDIH BPK RI\]](#)

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya

https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/KEPMENKES_104_2020_Penetapan_Infeksi_Novel_Coronavirus_Penyakit_Yang_Dapat_Menimbulkan_Wabah.pdf

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/171647/keputusan-menkes-no-hk0107menkes4132020>

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

<https://www.patikab.go.id/v2/uploaded/2020/KMK%20No.%20HK.01.07-MENKES-12757-2020%20ttg%20Penetapan%20Sasaran%20Pelaksanaan%20Vaksinasi%20COVID-19.pdf>

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169665/permenkes-no-10-tahun-2021>

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/171444/permenkes-no-16-tahun-2021>

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/171640/keputusan-menkes-no-hk0107menkes46382021>

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6424/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

<https://covid19.go.id/storage/app/media/Regulasi/2022/Januari/KMK%20No.%20HK.01.07-MENKES-6424-2021%20ttg%20Juknis%20Pelaksanaan%20Vaksinasi%20Dalam%20Rangka%20Penanggulangan%20Pandemi%20COVID-19-signed.pdf>

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali

<https://covid19.go.id/artikel/2022/11/23/instruksi-menteri-dalam-negeri-nomor-49-tahun-2022>

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah

<https://jdih.jatengprov.go.id/mobile/inventarasi-hukum/view/perda-nomor11-tahun-2013-0>

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah

<https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/no-25-tahun-2020-3>

Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan “Satgas Jogo Tonggo

<https://covid19.go.id/p/regulasi/instruksi-gubernur-jawa-tengah-selaku-ketua-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19-di-provinsi-jawa-tengah>

Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM) Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Propinsi Jawa Tengah

http://ppidsetda.jatengprov.go.id/informasi_serta_merta

Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Implementasi Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Transisi Menuju Endemi Di Provinsi Jawa Tengah

https://humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1673926720609-Instruksi%20Gubernur%20Nomor%201%20Tahun%202023.pdf

Peraturan Daerah kabupaten Kendal No. 23 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah

perda_23_2011.pdf (kendalkab.go.id)

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/107481/perda-kab-kendal-no-5-tahun-2018>

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 443.3.8/271/Dinkes tentang Pembentukan Tim Pelaksana Vaksinasi *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2021

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 443.3.8/9346/Dinkes tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana Layanan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kendal

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 443.3.2/1173/Dinkes tentang Penetapan Klinik Pratama Kartika 18 Kendal Sebagai Pelaksana Layanan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Kendal

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 443.3.2/3397/Dinkes tentang Penetapan Sentra Vaksin dan Koordinator Sentra Vaksin Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2021

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 440/3629.1/Dinkes tentang Penetapan Tim Verifikator Insentif Tenaga

Pendukung Penanganan *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) di Kabupaten Kendal Tahun 2021

Website

Pemerintah Kabupaten Kendal Tanggap Covid-19, 2021. *100 Hari Kerja Bupati Kendal Dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19*, diakses dari <https://corona.kendalkab.go.id/download>

COVID-19 Hotline 119, 2020. *Analisis Data Covid-19 Indonesia (Update Per 20 Desember 2020)*, diakses dari <https://covid19.go.id/id/artikel/2020/12/26/analisis-data-covid-19-indonesia-update-20-desember-2020>

